KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pantura makin rentan, BOPPJ tangani krisis lingkungan pesisir
Tanggal : Minggu, 04 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pantura Makin Rentan

BOPPJ Tangani Krisis Lingkungan Pesisir

ANGGOTA Komisi IV DPR Riyono menilai keberadaan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) dibutuhkan untuk menangani berbagai persoalan pesisir secara komprehensif. Pasalnya, Pantai Utara (Pantura) menghadapi ancaman ekstrem akibat perubahan iklim, penurunan muka tanah, serta tekanan perkembangan aktivitas ekonomi pesisir.

Dia bilang, pengelolaan kawasan Pantura Jawa sebenarnya sudah jadi tantangan lama sebelum lembaga ini terbentuk. Anomali perubahan iklim terus memengaruhi kondisi fisik wilayah pesisir, sehingga dampaknya kian nyata. Hal ini memicu risiko kerusakan lingkungan yang memperparah degradasi kawasan secara berkesinambungan.

Kata Riyono, penurunan muka tanah memicu ancaman banjir rob yang intensif di wilayah Jakarta, Pekalongan, Kendal, Semarang, hingga Demak. Kerentanan fisik itu membahayakan keselamatan masyarakat serta infrastruktur lokal. "Pembentukan badan khusus ini demi menangani krisis lingkungan wilayah pesisir secara menyeluruh," ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Tekanan terhadap Pantura Jawa, sambung Riyono, kian meningkat seiring pesatnya perkembangan kawasan industri pesisir. Penanganan komprehensif wajib menyelaraskan faktor lingkungan, infrastruktur penunjang, kegiatan ekonomi regional, serta keselamatan warga lokal. Keseimbangan ini krusial agar pembangunan wilayah pesisir tidak merusak ekosistem yang ada.

Menurutnya, BOPPJ hadir sebagai instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi serta memastikan penanganan kawasan dilakukan terpadu. Langkah terintegrasi itu menjamin penanganan berbagai ancaman lingkungan dapat berjalan berkelanjutan. "Seluruh pemangku kepentingan wajib menyatukan langkah demi melindungi kawasan pesisir dari kerusakan permanen," tegasnya.

Sejalan dengan itu, pembangunan Giant Sea Wall (GSW) dirancang sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan pesisir secara terpadu. Proyek infrastruktur laut ini jadi tembok penghalang banjir rob sekaligus memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir yang rentan.

Infrastruktur perlindungan pantai perlu memadukan kekuatan konstruksi modern dengan pengayaan lingkungan hidup lokal. Bentuk tanggul tidak boleh hanya mengandalkan beton keras saat menghadapi hantaman ombak atau ancaman iklim. Pendekatan kompleks ini memastikan daya tahan kawasan pesisir semakin optimal.

Konsep GSW, menurutnya, perlu mengadaptasi model keberhasilan penanganan pesisir dari negara Belanda serta Korea Selatan. Penerapannya di kawasan pesisir Indonesia disesuaikan dengan karakter lingkungan dan ekosistem lokal. Penyesuaian ini menjamin efektivitas perlindungan pantai terhadap potensi krisis perubahan iklim global.

Dia bilang, pengelolaan Pantura Jawa membutuhkan perencanaan jangka panjang agar infrastruktur bertahan menghadapi ancaman banjir rob. ■ PYB